

DEMOKRASI PENDIDIKAN ALA SOEKARNO DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Sukma Umbara Tirta Firdaus

Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan, dan menemukan implikasinya bagi pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan *hermeneutik*. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode *deskriptif-analitik*. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan adalah, bahwa proses pendidikan itu harus dilaksanakan secara demokratis, dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar tanpa dihindangi perasaan takut dan tertekan, mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh keceriaan. Yang ditekankan Soekarno di sini terletak pada bentuk dan proses belajar-mengajarnya, diharapkan dari proses tersebut dapat menumbuhkan sikap peserta didik yang kritis, demokratis, terbuka dan bebas dalam mengemukakan pendapat dan melakukan tindakan. (2) Implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam adalah, bahwa pendidikan Islam juga harus dilaksanakan secara demokratis. Pola pembelajaran dalam pendidikan Islam yang masih tradisional (*konvensional*) harus di rubah dengan pola-pola pendidikan yang lebih dinamis dan *modern*. Pola *dogmatis* atau pola hubungan *finalistis* yang menempatkan murid sebagai obyek atau benda pasif dalam pendidikan Islam harus ditinggalkan diganti dengan pola hubungan baru, yaitu pola hubungan kemitraan yang *egaliter* antara guru dan murid, serta memberikan kebebasan (kemerdekaan) berpikir kepada para murid.

Kata kunci: Soekarno, demokrasi, reformasi, pendidikan, pendidikan Islam.

A. Pendahuluan

Sejak bergulirnya era Reformasi telah membuat kehidupan di Indonesia serba terbuka dan transparan. Tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Reformasi didorong oleh keinginan rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan yang semestinya, yang sesuai dengan jati diri bangsa yaitu kehidupan yang demokratis. Hal ini muncul karena rakyat merasa pada rezim yang berkuasa saat itu (Orde Baru), kehidupan rakyat dikekang dan demokrasi dihilangkan dalam budaya Bangsa Indonesia. Kegelisahan rakyat tersebut menyatu dan mengalami puncak di tahun 1998 yang menandai mulainya Orde Reformasi sekaligus mengubur rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Tuntutan rakyat saat itu tidak banyak, hanya satu kata yang menjadi tujuannya yaitu "demokrasi". Rakyat menginginkan satu kata tersebut ("demokrasi") benar-benar ada dan nyata dalam budaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Setelah Reformasi berjalan ternyata hal ini juga menimbulkan sebuah perubahan-perubahan dalam sektor kehidupan dan tatanan sosial kemasyarakatan yang lain, seperti dalam kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan dan bahkan agama. Isu demokrasi ini juga mempengaruhi dunia pendidikan khususnya masa depan pendidikan Islam di Indonesia.

Tentunya pendidikan Islam juga harus ikut ambil bagian dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokratis tentunya tidak hanya untuk saat ini saja namun juga untuk masa depan. Maka dari itu, pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia masa depan yang demokratis yang mampu membawa tongkat estafet bangsa ini. Untuk menciptakan anak bangsa yang berjiwa demokratis, tentunya hal itu tidak datang begitu saja. Perlu dilakukan sebuah pembiasaan dan pembinaan sejak dini agar anak-anak tersebut terbiasa dalam sebuah kehidupan yang demokratis.

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam melakukan hal tersebut melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formalnya. Terutama dalam hal ini adalah pesantren,¹ karena sehari-hari dalam setiap kegiatan anak dari pendidikan formal, pendidikan non formal hingga kehidupan keseharian yang lain anak ada dalam lingkungan pesantren tersebut, maka bagaimana kultur di pesantren ini mampu merangsang jiwa anak agar berjiwa demokratis. Selain pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain seperti pada madrasah baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (MI, MTs, MA, dan perguruan-perguruan tinggi Islam) juga

¹Diakui atau tidak, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang silam dan telah banyak memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa ini.

harus melakukan hal yang sama, yaitu menjadi duta demokrasi bagi bangsa ini, dengan membiasakan hidup demokratis dalam setiap kegiatannya.

Atas dasar ini semua, maka pendidikan Islam harus berjiwa demokratis seiring dan seirama dengan tuntutan reformasi. Jika sebelum reformasi masih ada pendidikan Islam yang kurang demokratis, maka sudah saatnya budaya-budaya demokrasi itu dibudayakan dalam kultur pendidikan Islam ke depan. Hal inilah yang melatarbelakangi pembahasan dalam penelitian ini. Dengan prinsip dasar bahwa Islam adalah agama *egaliter* yang keberadaannya untuk kesetaraan umat manusia, keadilan dan kebersamaan. Pada titik singgung ini, pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan menjadi sangat relevan. Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menelaah pemikiran Soekarno² tentang demokrasi pendidikan dan implikasinya bagi pendidikan Islam.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan?
2. Apa implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam?

Konsep demokrasi pendidikan dalam Islam tidak lepas dari landasan teori yang digali dari pemahaman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Baik secara normatif maupun empiris, Islam sama sekali tidak anti-demokrasi.³ Secara normatif, Islam memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaidah yang merupakan kata kunci dari substansi demokrasi.⁴ Menurut Abdur Rahman Assegaf, di antara kaidah-kaidah itu adalah; *pertama*, kaidah *ta'aruf* (saling mengenal). Prinsip-prinsip dasarnya bersumber dari:

²Soekarno (6 Juni 1901 – 21 Juni 1970) adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Namun sebenarnya, perjuangannya bagi Bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan jauh lebih besar. Soekarno bersama Mohammad Hatta membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga dia mendapat predikat Bapak Proklamator. Selain itu, Soekarno juga menjadi salah satu Bapak Bangsa (*founding fathers*) yang banyak berperan dalam membangkitkan, memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang disampaikan pada 1 Juni 1945.

³Jalaluddin Rakhmat, "Islam dan Demokrasi", dalam *Agama dan Demokrasi* (Jakarta: P3M, 1994), 40-41, dalam Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 193.

⁴Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 107-117. Lihat juga Bahtiar Effendy, "Islam, Demokrasi dan HAM", dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 29, dalam Abd. Rahman, *Pendidikan*, 193.

arif) di antara pihak yang bermusyawarah. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah.”

Bagi umat Islam, musyawarah dilaksanakan tanpa melanggar hak Allah dan Rasul-Nya. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Tata cara shalat, puasa, haji dan lainnya merupakan *ibadah makhdah* (ibadah murni) yang syarat dan rukunnya telah ditentukan oleh Allah melalui Rasul-Nya, adalah hak Allah, tidak perlu dimusyawarahkan.

Ketiga, kaidah *ta’awun* (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama antar berbagai pihak. Kerja sama dalam pandangan Islam dilakukan berdasarkan *mutual cooperation*, di samping dalam rangka kebajikan dan *takwa*, bukan perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dalam Al-Quran di jelaskan:

... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمِدُوا عَلَىٰ وَالِدَيْكُمْ وَأَوْلِيَٰكُمْ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَلِمَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ السَّلَامَةُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٥٧﴾

Keempat, *mashlahah* atau menguntungkan masyarakat.¹⁰ Kalau pelaksanaannya adalah pemerintah, maka seluruh programnya mestilah diajukan bagi kemakmuran masyarakat umum, mengikuti rumusan *the greatest happiness for the greatest number*. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan yang paling utama dalam tindak lanjutnya. *Mashlahah* bagi masyarakat adalah *mashlahah* bagi negara, tetapi belum tentu sebaliknya.

Kelima, kaidah *’adil* atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدِّبُوا الَّذِينَ فِي بُيُوتِكُمْ لِيَرَوْا آيَاتِنَا وَلِيَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٥٨﴾

¹¹ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدِّبُوا الَّذِينَ فِي بُيُوتِكُمْ لِيَرَوْا آيَاتِنَا وَلِيَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٥٨﴾

Atas dasar firman Allah Swt inilah, Nabi Muhammad Saw selalu konsisten dalam melaksanakan hukum ini meskipun di lingkungan keluarganya, sebagaimana disabdakannya,

⁹QS. *al-Maidah* (5): 2 (yang artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”).

¹⁰Kuntowijoyo, *Identitas*, dalam Abd. Rahman, *Pendidikan*, 100-101.

¹¹QS. *An-Nisa* (4): 58 (yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”).

"*Andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, tentulah pula aku potong tangannya*". Perlakuan adil terhadap sesama adalah prinsip yang dibangun Islam, dan itu merupakan pilar demokrasi.¹²

Teori di atas merupakan prinsip dan kaidah demokrasi dalam Islam secara umum. Namun, Islam yang meletakkan pendidikan menjadi elemen penting dalam ajarannya, maka prinsip dan kaidah tersebut juga berlaku dalam dunia pendidikan Islam.

Selanjutnya, Abdul Munir Mul Khan berpendapat bahwa makna demokrasi pada konteks pendidikan yaitu, bahwa demokrasi pendidikan merupakan operasionalisasi pendidikan yang menghargai pembawaan, persamaan dan kebebasan peserta didik dalam upaya mengembangkan diri secara optimal ke arah pembentukan pribadi mandiri yang utuh.¹³

Sedangkan menurut Mangunwijaya, keberadaan peserta didik seperti di atas, sebagaimana diungkapkan Abdul Munir Mul Khan, memerlukan adanya lembaga atau penyelenggara lembaga pendidikan yang mau memahami jati diri peserta didik, kebutuhan obyektif dan realitas sosial yang dihadapi.¹⁴ Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan tidak hanya merupakan sarana pembangunan individu peserta didik tapi juga dapat menjadi sarana transformasi sosial.

Berangkat dari pendapat di atas, bahwa sebenarnya pendidikan yang diidealkan adalah pendidikan yang anti terhadap model-model pendidikan "gaya bank"¹⁵ yang menempatkan manusia sebagai benda mati yang dapat diatur dan dicetak secara seragam sesuai dengan keinginan sang guru. Oleh karena itu demokrasi pendidikan juga menentang keras terhadap gaya pendidikan indoktrinatif, pencekokan, pendiktean yang mengandung penindasan terhadap kebebasan manusia, karena kebebasan merupakan fitrah ontologis manusia yang dihargai dan diarahkan secara positif.

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa pendidikan demokratis harus menjadikan peserta didik agar percaya pada diri sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Para guru hendaknya memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berpikir tanpa terpaku kepada pendapat orang lain dan ini dilakukan agar mereka bisa menentukan kehidupan masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.¹⁶

Kebebasan peserta didik untuk berpikir, bersikap dan bertindak akan terwujud manakala pola hubungan antara pendidik dengan peserta didik setara dan sejajar dan menafikan hubungan

¹²Abd. Rahman, *Pendidikan*, 193-195.

¹³Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim* (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), 183.

¹⁴Mangunwijaya, *Mendidik Manusia Merdeka* (Yogyakarta: Dian Interfidie & Pustaka Pelajar, 1993), 271.

¹⁵Baca lebih lengkap dalam Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj. Utomo Danandjaya, dkk. (Jakarta: LP3ES, 2008, Cet. VI), 51-74.

¹⁶Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, terj. Syamsudin Asyrafi, dkk. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 57.

yang bersifat atas-bawah (*top down*). Pendidik dan peserta didik sama-sama menjadi subyek yang mengadakan refleksi dan aksi bersama pada obyek realitas secara terus-menerus.¹⁷

Dari hasil penelusuran penulis, banyak para peneliti yang telah membahas pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia ini. Namun, yang membahas terkait perhatian Soekarno pada dunia pendidikan belum banyak. Terdapat Buku dengan judul "*Pendidikan di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno*" yang ditulis oleh Saudara Syamsul Kurniawan.¹⁸ Buku yang semula tesis ini menjelaskan bahwa Soekarno juga menaruh perhatian serius terhadap pendidikan dan terutama pendidikan Islam. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pendidikan Islam menjadi salah satu perhatian Soekarno karena dapat dipakai sebagai sarana transformasi masyarakat muslim Indonesia, juga pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal dan mengembangkan intelektualitas.

Penelitian ini berbeda dari hasil penelitian di atas. Penelitian ini bermaksud untuk memosisikan diri dalam perbincangan wacana demokratisasi pendidikan Islam. Bila Syamsul Kurniawan mengupas terkait modernisasi pendidikan Islam yang coba ditawarkan oleh Soekarno, karena selama ini pendidikan Islam cenderung masih tradisional dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dalam budaya Indonesia yang menganut paham demokrasi, modernisasi pendidikan Islam di Indonesia jangan sampai meninggalkan nilai-nilai tersebut. Di sinilah letak penelitian ini, mencoba mengingatkan bahwa dalam melakukan modernisasi pendidikan Islam jangan asal modern saja, tetapi lakukan dan kedepankan nilai-nilai demokratis, yang menjadi jadi diri Bangsa Indonesia sebagaimana selalu didengungkan Soekarno, dan juga sebagaimana diisyaratkan dalam Budaya Islam.

B. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁹ yang mana pada proses penelitiannya difokuskan pada suatu penggalian data dan analisis yang memakai

¹⁷Paulo Freire, *Pendidikan*, 19-27.

¹⁸Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009).

¹⁹Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), 26.

sumber kepustakaan, yakni menjadikan bahan pustaka (buku) sebagai sumber utama (data primer), sehingga lebih sebagai analisa dokumenter (*documentary-analysis*).

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan hermeneutik (*hermeneutical approach*),²⁰ yang digunakan untuk mengungkapkan substansi dari pemikiran Soekarno. Pendekatan ini merupakan interpretasi dari gagasan Soekarno tentang demokrasi pendidikan yang berposisi sebagai teks (*as text*), sedangkan penulis yang berposisi sebagai pembaca (*reader*), berusaha untuk mengungkapkan (dalam rangka melakukan pembacaan secara kritis) implikasi dari gagasan Soekarno tentang demokrasi pendidikan tersebut bagi pendidikan Islam.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan metode hermeneutik di sini adalah proses penguraian yang bertolak dari isi dan makna yang tampak (yaitu pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan), kepada makna yang tersembunyi (implikasinya bagi pendidikan Islam). Pendekatan hermeneutik ini memang pada awalnya digunakan untuk menafsirkan kitab suci saja, namun semenjak Wilhelm Dilthey (1833-1911), yang kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa pemikir sesudahnya seperti Heidegger dan Gadamer, metode ini mulai dipergunakan untuk ilmu-ilmu kemanusiaan (*geisteswissen-schaften*) atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan (*life science*) seperti bidang sejarah, psikologi, hukum, agama, filsafat, seni, kesusastraan, linguistik dan sebagainya.²¹

Subyek penelitian bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber itu didasarkan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tulisan Soekarno sendiri yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu tentang konsep demokrasi dalam pendidikan. Beberapa tulisan Soekarno itu terkumpul dalam Buku "*Di Bawah Bendera*

²⁰Hermeneutik secara umum dapat didefinisikan sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutik itu sendiri berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuien*, yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasi atau menterjemahkan. Jika asal kata hermeneutik dirunut, maka kata tersebut merupakan derivasi dari kata Hermes, seorang Dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*message*) dari sang Dewa kepada manusia. Menurut versi lain dikatakan bahwa Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Tugas utama Hermes yang digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kaki bersayap dan lebih dikenal dengan sebutan Mercurius adalah menerjemahkan pesan-pesan dari Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Oleh karenanya, Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menterjemahkan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya, sehingga pesan-pesan tersebut dapat dipahami maknanya. Dengan demikian, kata hermeneutik yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art interpretation*) sebuah teks. Lihat Nafisul Atho' dan Arif Fahrudin (Ed.), *Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 14-15.

²¹Nafisul dan Arif (Ed.), *Hermeneutika*, 21.

Revolusi" jilid satu dan jilid dua, dan sebuah buku yang ditulis oleh Soekarno dengan judul "*Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perdjongan Republik Indonesia*".

Sedangkan data sekunder adalah karya-karya lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini, baik berupa buku, makalah, maupun artikel-artikel yang tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal maupun internet.

Dua variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (yang diteliti), kemudian ditarik kesimpulannya.²²

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan operasionalisasi pendidikan yang menghargai pembawaan, persamaan dan kebebasan peserta didik dalam upaya mengembangkan diri secara optimal ke arah pembentukan pribadi mandiri yang utuh.²³

Variabel kedua adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.²⁴

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah secara *detail* konsep demokrasi pendidikan menurut Soekarno dan menemukan implikasi dari konsep demokrasi pendidikan yang ditawarkan oleh Soekarno tersebut untuk diterapkan dalam perjalanan pendidikan Islam ke depan. Khususnya bagi pendidikan Islam yang dinilai kurang demokratis dalam pelaksanaan pembelajarannya di masa sebelum reformasi. Untuk masa saat ini yang sudah memasuki era reformasi, tentunya kesadaran berdemokrasi sudah banyak dipahami dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan datanya melalui studi pustaka yang banyak diperoleh melalui pengumpulan data-data yang terdapat dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku saja, melainkan juga diperoleh melalui bahan-bahan studi dokumentasi, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, *web-site* dan lain-lain. Karena merupakan studi pustaka, maka dalam pengumpulan datanya merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang berupa data verbal dalam bentuk kata bukan angka. Penekanan dalam penelitian ini adalah menemukan pemikiran Soekarno tentang konsep demokrasi dalam

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 60.

²³Munir, *Paradigma*, 183.

²⁴Hasan Langgulung dalam Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan; Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2006), 13.

pendidikan yang tertuang dalam tulisan-tulisannya dan karya-karya orang lain yang membahas pemikiran Soekarno.

Penelitian ini menekankan pada deskripsi dan analisis masalah. Artinya, data yang didapatkan dianalisis secara kritis dengan teknik atau metode *deskriptif-analitik*. Adapun yang dimaksud *deskriptif* dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data-data dalam bentuk kata dalam hal ini adalah pemikiran Soekarno mengenai demokrasi pendidikan sehingga ditemukan konsep-konsep demokrasi dalam pendidikan menurut Soekarno.

Kemudian *analitik* berarti menganalisis data-data yang telah terkumpul, yaitu implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi perjalanan pendidikan Islam ke depan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sketsa Demokrasi

Berbicara soal demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah di mengerti begitu saja. Demokrasi adalah sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas masyarakat dan bernegara, termasuk juga Indonesia. Secara bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), berarti kekuasaan oleh rakyat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat). Demokrasi juga dimaknai sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²⁵

Demokrasi di Indonesia pertama kali di dengungkan lebih berani pada zaman kolonial Belanda oleh Syarekat Islam (SI) yang sejak semula adalah gerakan politik. SI adalah transformasi dari Syarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada tanggal 11 November 1911 oleh H. Samanhudi (1868-1934) di Surakarta. Kemudian pada 10 September 1912, SDI diubah menjadi Syarekat Islam (SI). Dengan pembaharuan nama ini, SI tidak hanya bergerak dalam menentang dominasi perdagangan Cina tetapi juga dalam bidang keagamaan serta politik di bawah kepemimpinan HOS. Tjokroaminoto (1882-1934) dan SI dikenal sebagai Partai Politik pertama di Indonesia.²⁶

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi III, Cet. III), 249.

²⁶Masykur Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 27-28

Di Indonesia secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat Islam Indonesia, modernisme dan sayap pesantren, telah memilih sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita politik Islam.²⁷

Secara historis, sejak kemerdekaannya, Bangsa Indonesia telah menjalankan setidaknya empat bentuk demokrasi yaitu Demokrasi Parlemerter (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila / masa Orde Baru (1965-1998) dan Demokrasi Reformasi (1998-sekarang, yang sebenarnya berusaha untuk memantapkan kembali Demokrasi Pancasila kepada yang sesungguhnya, karena Demokrasi Pancasila pada masa sebelumnya, masa Orde Baru, kurang tepat dan menyimpang). Pada dasarnya setiap bentuk demokrasi tersebut menggunakan Pancasila sebagai filsafat negara dan Pancasila mempunyai sila-sila yang mengusung demokrasi sebagai sistem pemerintahan terutama sila kedua, keempat dan kelima.

2. Fenomena Pendidikan Nasional

Dalam perjalanan pendidikan nasional, pemerintah telah beberapa kali merevisi sistem pendidikan (kurikulum) dengan maksud mendapatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang baik dan memiliki daya saing tinggi. Dengan sistem yang telah beberapa kali direvisi tersebut, seyogianya pemerintah mampu menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan seperti saat ini. Namun apa hasil yang dapat kita lihat sekarang? Indonesia masih belum dapat keluar dari jeratan krisis dan berbagai persoalan yang dihadapi.

Setelah kita amati, terlihat bahwa masalah serius dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan ini menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Pendidikan yang berjalan harus memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (guru dan dosen, juga para ustad/ ustadzah) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna dan berhasil.

Selama ini banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan sampai

²⁷Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 1987), 125-127.

jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itulah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai potensi (kelebihan dan keahlian) di bidangnya masing-masing, dari itu diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

Selanjutnya sebagaimana sudah disinggung di atas, sebenarnya sangat disayangkan juga sistem pendidikan (kurikulum) kita yang selalu berubah-ubah sehingga hal tersebut bisa membingungkan pendidik dan peserta didik.

Seiring perubahan zaman, dunia pendidikan juga harus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berkembang dan mengalami perubahan, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi seperti saat ini. Kompetensi-kompetensi yang dimiliki dalam lembaga-lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar yang dibutuhkan.

3. Posisi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam sudah ada di Indonesia sejak negara ini belum merdeka. Secara historis, pendidikan Islam mulai muncul dan diprakarsai oleh para ulama dan Kiai di kampung-kampung melalui bentuk pesantren, masjid dan surau-surau, dengan mengajarkan dan mengkaji al-Quran, aqidah dan tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya para ulama dan pelajar Indonesia yang bersekolah di Mekkah dan beberapa daerah di Timur Tengah, maka sepulangnya dari sana mereka berusaha untuk memperkenalkan dan mempraktekkan pendidikan yang telah mereka dapatkan di Timur Tengah tersebut, yaitu dengan sistem klasikal. Maka setelah itu dikenallah istilah Madrasah, yang merupakan bentuk lembaga pendidikan formal Islam pada masa itu, yang sebenarnya saat itu untuk menyaingi lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk penjajah (Pemerintah Belanda) yang mana lembaga-lembaga pendidikan bentukan Belanda tersebut hanya diperuntukkan untuk kalangan bangsawan. Madrasah ini memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan, yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

Setelah Indonesia merdeka, angin segar bagi madrasah berhembus dengan dikeluarkannya maklumat pada tanggal 22 Desember 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), yang di antaranya menganjurkan untuk memajukan pendidikan dan pengajaran yang berjalan di madrasah, pengajian-pengajian di langgar atau surau-surau dan pondok pesantren. BP KNIP juga menyarankan agar institusi-institusi pendidikan rakyat yang seperti itu, yang keberadaannya sudah berakar dalam masyarakat Indonesia, mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah. Maklumat ini diwujudkan melalui Departemen Agama yang didirikan

pada 3 Januari 1946, dan sejak saat itu pembinaan dan pengembangan madrasah dan pondok pesantren menjadi tugas pokok pemerintah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). Sejak saat itulah keberadaan pendidikan Islam (madrasah) mulai diakui pemerintah.²⁸

Melalui Departemen Agama pula, pemerintah berusaha mengintegrasikan pendidikan madrasah menjadi salah satu komponen pendidikan nasional, dan upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya lembaga-lembaga pendidikan agama secara yuridis yang dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 ayat 2, menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.²⁹

Hal ini terus berlanjut hingga Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 2003, merupakan undang-undang yang mempertegas jalur, jenjang dan jenis pendidikan, di mana Madrasah (MI, MTs, MA) mendapatkan tempat dan kedudukan yang sama dengan sekolah umum dengan pelaksanaan kurikulum yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa madrasah bukanlah lagi pendidikan kelas dua, dan hal ini juga sekaligus menuntut madrasah untuk mengejar ketertinggalannya dalam mutu penyelenggaraannya hingga mutu lulusan agar sama dengan sekolah umum (dan bahkan seharusnya bernilai tambah). UU Sisdiknas tersebut menempatkan MI dan MTs sebagai pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bercirikan agama Islam), dan MA sebagai pendidikan menengah (sekolah menengah atas yang bercirikan agama Islam), ketiga jenjang pendidikan ini diselenggarakan oleh Kementrian Agama.³⁰

4. Soekarno, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam

Soekarno selain seorang tokoh nasional dan juga pahlawan di Bangsa ini, juga menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini berangkat dari latar belakang Soekarno sendiri yang merupakan anak seorang guru dan juga dari pengalaman hidup yang dialaminya.

²⁸Nurhayati Jamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesian Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 179.

²⁹Departemen Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998), 77.

³⁰Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 137.

Soekarno (1901-1970) lahir di Kampung Lawang, Seketeng, Surabaya Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 yang bertepatan pada hari Kamis,³¹ dengan nama lahir Kusno Sosro Soekarno. Ayah Soekarno bernama Raden Soekemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Soekemi berasal dari bangsawan Jawa kelas priyayi yang masih keturunan Raja Kediri, bahkan nenek moyang Soekarno merupakan pejuang kemerdekaan yang gugur dalam Perang Puputan dan Perang Diponegoro.³² Ida Ayu Nyoman Rai adalah penganut Agama Hindu Bali berasal dari Kasta Brahmana. Dia dipersunting Soekemi saat Soekemi bertugas sebagai guru di Singaraja, Bali.

Soekarno memperoleh pendidikan pengetahuan informal dari ayahnya, seorang yang mendapat pendidikan pola barat, Islam dan penganut faham *teosofi* yang banyak mengajarkan etika dan kepercayaan. Ayahnya banyak mengajarkan cara hidup disiplin, baca tulis dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Soekarno juga mendapat pelajaran dari ibunya yang selalu mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan kebaikan hati seorang ibu.³³

Pada usia 4-5 tahun, Soekarno diajak kakek dari pihak ayahnya ke rumahnya di Tulungagung Jawa Timur.³⁴ Di Tulungagung ini, Soekarno mengenyam pendidikan formal untuk pertama kalinya. Atas dorongan kakeknya Soekarno masuk sekolah di tempat sang ayah mengajar. Sesuai dengan kedudukan ayahnya sebagai seorang guru yang sering berpindah-pindah. Soekarno pun ikut pindah mengikuti ayahnya, dari Tulungagung pindah ke Mojokerto, pindah ke Sidoarjo, kemudian pindah lagi ke Mojokerto dan disinilah ia masuk dan menyelesaikan pendidikan di *Europese Lagere School* (ELS; sekolah dasar Belanda) yang selesai pada tahun 1914.³⁵ Selama di sekolah dasar, Soekarno telah mengamati ada perlakuan diskriminatif antara anak-anak Belanda dengan Pribumi. Meskipun demikian Soekarno tetap memperoleh kecerdasan yang membanggakan, dia sangat giat belajar sehingga menjadi murid yang menonjol.³⁶

Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS Mojokerto, Soekarno dikirim ayahnya untuk melanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya. Meskipun Soekarno disekolahkan oleh ayahnya di sekolah Belanda namun ayahnya tidak mengharapkan Soekarno memiliki sifat

³¹Cindy Adams, *Bung Karno; Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Abdul Bar Salim (Jakarta: PT. Tema Baru, 2001), 25.

³²*Ibid.*, hal. 27-28.

³³*Ibid.*

³⁴Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam; Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002), 16.

³⁵Ketika Soekarno diterima di sekolah ELS, masa itu belum lazim bagi seorang Pribumi untuk sekolah di sekolah tersebut. Oleh karena itu, mereka yang berhasil memasuki sekolah dan duduk di tengah-tengah anak-anak kulit putih dan *Indo* selalu menjadi sasaran penghinaan. Hal itu menimbulkan pertengkaran, karena Soekarno selalu membela kehormatan bangsanya sendiri. Suhelmi, *Polemik*, 19.

³⁶Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

kebarat-baratan, untuk itu ayahnya menitipkan Soekarno pada HOS. Tjokroaminoto yang merupakan teman ayahnya sendiri. Pada saat itu Tjokroaminoto merupakan seorang pemimpin yang karismatik dari Syarekat Islam (SI).³⁷ Soekarno bukanlah satu-satunya yang tinggal di rumah Tjokroaminoto, namun ia tinggal bersama 30 orang teman lainnya dengan membayar uang kos (sewa) sekadarnya.³⁸

Sejak di Surabaya, lingkungan sangat mempengaruhi alam pemikiran Soekarno karena dia banyak bergaul dan berdiskusi dengan para tokoh gerakan dan tokoh nasional, yaitu dengan Tjokroaminoto sendiri dan tamu-tamu dari Tjokroaminoto, karena saat itu Tjokroaminoto adalah Ketua SI jadi wajar bila banyak tokoh yang berkunjung ke rumahnya.³⁹ Komunikasi tidak langsung Soekarno dapatkan dari banyak membaca buku di perpustakaan. Dari buku-buku yang dibaca, ia memperoleh banyak pengetahuan mengenai riwayat hidup berbagai tokoh seperti sejarah nabi, pemikir, negarawan dan sebagainya.⁴⁰

Pada tahun 1921 Soekarno lulus dari HBS. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di Belanda tidak diestui oleh ibunya. Pertama karena alasan biaya, kedua karena ibunya menghendaki agar Soekarno berada di tanah airnya sendiri. Akhirnya Soekarno berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di *Technische Hogere School* (THS; sekolah tinggi teknik, sekarang ITB).⁴¹ Sejak tinggal di Bandung, Soekarno mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh lain seperti Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat serta tokoh-tokoh yang lain.

Tokoh-tokoh ini olehnya disejajarkan dengan peranan Tjokroaminoto, karena dasar pemikirannya sama yakni mencari rumusan untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Walau demikian, Soekarno mengakui bahwa Tjokroaminoto memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pemikirannya. Bagi Soekarno, Tjokroaminoto adalah tokoh politik dan pemikir masalah-masalah ke-Islaman dan tempat bertemunya berbagai aliran pemikiran. Karena itu Soekarno melukiskan rumah tangga gurunya itu dengan "mata air semua ideologi".⁴²

Setelah menamatkan pendidikannya di THS dan sudah terlepas dari tekanan kampus, Soekarno mulai bebas melakukan berbagai kegiatan politik sampai pada mendirikan Partai

³⁷Suhelmi, *Polemik*, 19.

³⁸Benhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Grasindo, 2000), 34.

³⁹Adams, *Bung Karno*, 68.

⁴⁰M. Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno Tentang Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 67.

⁴¹Adams, *Bung Karno*, 69-71.

⁴²Ridwan, *Pemikiran*, 67.

Nasional Indonesia (PNI) bersama teman-temannya dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya.⁴³

Dari berbagai kegiatan politik yang dilakukan Soekarno, ternyata ia juga prihatin dan menaruh perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini, mungkin berangkat dari pengalaman Soekarno ketika sekolah di ELS dulu, yaitu adanya perlakuan diskriminatif antara anak-anak Belanda dengan Pribumi, yang menyebabkan anak-anak Pribumi kurang begitu diperhatikan dan kurang diberi fasilitas yang cukup untuk belajar sebagaimana yang didapat anak-anak Belanda. Di samping itu, karena Soekarno juga anak seorang guru maka sedikit banyak tentu dia berkomunikasi (berdiskusi) dengan ayahnya perihal permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia.

Soekarno yang seorang aktivis dan pejuang itu merasa resah dan merasa mempunyai tanggung jawab terhadap persoalan ini, dia berusaha untuk melakukan sebuah perubahan, lebih-lebih setelah dia memproklamirkan Bangsa ini dan menjabat Presiden. Mengingat masalah pendidikan ini cukup *vital* dan menentukan, Soekarno segera membentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dalam kabinetnya dengan menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri.

Soekarno mengatakan, keadaan masyarakat Indonesia ke depan dapat dilihat dengan kondisi pendidikannya saat ini, bila pendidikan saat ini berjalan dengan baik maka ke depan kehidupan masyarakat Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih baik pula.

Soekarno menyadari betul bahwa faktor pendidikan menjadi sangat penting, lebih-lebih bagi Indonesia yang baru merdeka saat itu, tentu membutuhkan masyarakat dan generasi penerus yang cerdas dan mampu untuk membawa tongkat estafet kemerdekaan bangsa agar tidak lagi kembali ke tangan penjajah. Untuk menghasilkan itu semua, rakyat Indonesia harus berilmu dan cerdas agar tidak dipermainkan oleh bangsa lain. Maka, Soekarno sebagai Presiden dan pendiri Bangsa sangat memperhatikan perkembangan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu.

Soekarno menghapus diskriminasi dalam pendidikan, sebagaimana di zaman penjajah. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan adalah untuk semua rakyat tanpa ada perbedaan satu sama lain. Sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 juga dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah akan menyusun suatu sistem pendidikan nasional untuk rakyat, untuk semua bangsa. Salah satu upaya

⁴³Adams, *Bung Karno*, 89-91.

untuk mencapai tujuan pendidikan itu adalah, Soekarno dengan posisinya sebagai Presiden langsung menginstruksikan untuk mendirikan universitas-universitas di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak hanya itu, Soekarno yang seorang Muslim juga menaruh perhatian terhadap pendidikan Islam, karena Soekarno mengetahui bahwa rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam dan pendidikan Islam ini sudah ada sejak negara Indonesia belum merdeka. Selain itu, pendidikan Islam juga mengambil peran yang berarti terhadap usaha-usaha mengusir penjajah dan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan.

Menurutnya, pendidikan Islam dapat dipakai sebagai sarana transformasi masyarakat muslim Indonesia. Bagi Soekarno, pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal dan mengembangkan intelektualitas. Dalam sejumlah tulisannya, Soekarno banyak menyebut dan mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh dunia Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan kebudayaan, intelektualitas dan berbagai fenomena politik di belahan dunia Islam. Tetapi Soekarno selalu yakin, jika umat Islam mau terbuka dan mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan pembaharuan, maka Islam bukan lagi agama dalam pengertian ritual belaka, melainkan akan menjelma menjadi kekuatan transformasi dan perubahan.⁴⁴

Soekarno berbicara demikian tentunya bukan tanpa dasar. Soekarno yang seorang tokoh nasionalis, dia adalah seorang Muslim dan banyak belajar tentang Islam. Soekarno mulai belajar Islam ketika dia dititipkan ayahnya pada Tjokroaminoto dalam menuntut ilmu di Surabaya. Meskipun Soekarno lebih banyak dipengaruhi pemikiran politik oleh gurunya (Tjokroaminoto) dari pada masalah keagamaan dalam arti sempit, tetapi Tjokroaminoto memberi pengaruh besar terhadap jiwa ke-Islaman Soekarno. "Islam adalah sebuah agama yang sederhana, rasional dan mengandung gagasan kemajuan (*ideas of progress*) dan egaliter",⁴⁵ itulah persepsi paling awal pemuda Soekarno tentang Islam.

Selain Tjokroaminoto, tokoh yang cukup menentukan dalam sosialisasi pemikiran keagamaan Soekarno adalah KH. Ahmad Dahlan. Setelah berguru kepada Tjokroaminoto, Soekarno kemudian menemukan "oase" baru semangat Islam dari KH. Ahmad Dahlan. Ia mulai berkenalan dengan KH. Ahmad Dahlan ketika diadakan tablig (ceramah agama) di dekat rumah

⁴⁴Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Cet. V (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), 342-344, 369-402

⁴⁵Dawam Rahardjo, "Bung Karno Sebagai Pemikir Islam", dalam Joesoef Ishak, *100 Tahun Bung Karno; Sebuah Liber Amicorum* (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), 138.

Tjokroaminoto, Soekarno langsung tertarik dengan ceramah KH. Ahmad Dahlan yang berisi tentang bagaimana agar agama dapat dijelaskan secara rasional dan kerakyatan. Sejak saat itu ia tertarik dengan tablig-tablig KH. Ahmad Dahlan dan sering menghadiri tablig Kiai tersebut di Surabaya.⁴⁶

Soekarno sering kali mengungkapkan kegelisahannya perihal nasib pendidikan Islam yang bersifat normatif sehingga cukup jauh dengan realitas objektif. Meski Soekarno sendiri mengakui bahwa kesadaran normatif memang mempunyai signifikansi yang besar untuk memelihara basis teologi umat. Namun, dalam menghadapi realitas empiris kesadaran normatif saja menurut Soekarno belum cukup. Terlihat di sini kalau Soekarno ingin menjadikan pendidikan Islam mempunyai kontribusi bahkan mampu mengendalikan realitas sosial. Sebab Soekarno menyadari bahwa dalam masyarakat modern, umat dihadapkan pada realitas-realitas problematik yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan kesadaran normatif saja, misalnya yang berkaitan dengan soal modernisasi dan kemajuan zaman.⁴⁷

Melihat fenomena ini Soekarno beranggapan bahwa perlu ada yang dirombak atau ditata ulang (*rekonstruksi*) dalam sistem pendidikan Islam, perlu adanya pembaharuan dalam pendidikan Islam yang itu relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi pendidikan Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Membicarakan tentang pendidikan Islam pada hari ini biasanya memunculkan gambaran pilu dalam pikiran kita tentang ketertinggalan, kemunduran dan kondisi yang serba tidak jelas. Gambaran ini muncul biasanya ketika pendidikan Islam dihadapkan dengan kemajuan sains Barat, namun lebih sering lagi muncul ketika dibenturkan dengan kejayaan Islam di masa lalu. Beberapa abad yang lalu Islam pernah menguasai peradaban di muka bumi ini, yang melahirkan banyak pemikir (*intelektual*) yang menjadi *kiblat* berbagai ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Namun, hal itu yang oleh Soekarno disebut sebagai *Islam-glory* tidak mampu dipertahankan dan Islam semakin mengalami kemunduran (*degradasi*).

Pendidikan menurut Soekarno menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan, sebagaimana Soekarno katakan "*Renaissance-paedagogie*", yaitu pendidikan harus dihidupkan kembali.⁴⁸ Karena nantinya apabila pendidikan Islam sudah kembali hidup dan maju, dengan sendirinya akan memberikan kebangkitan dan kemajuan bagi umat Islam. Islam, yang diyakini sebagai agama paling sempurna menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting yang mewajibkan umatnya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam

⁴⁶Suhelmi, *Polemik*, 25.

⁴⁷Soekarno, *Di Bawah*, 342-344, 369-402

⁴⁸*Ibid.*, 344.

selain menyusun ulang sistem pendidikannya yang lebih baru dan modern, tentunya dengan tetap berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Islam.

5. Konsep Demokrasi Soekarno

Menurut Soekarno, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nafas bangsa Indonesia yang berdasarkan atas budaya gotong-royong. Soekarno merumuskan konsep demokrasi yang memberi ruang kesempatan untuk partisipasi dalam politik dan ekonomi. Berbeda dengan demokrasi Barat yang memberi ruang kesempatan bagi rakyat hanya terbatas pada demokrasi politik saja. Maka, menurut Soekarno tidak hanya pada demokrasi politik namun juga harus memberi peran bagi rakyat dalam demokrasi ekonomi. Soekarno mengistilahkannya dengan “demokrasi sosial” atau “sosio-demokrasi” yang memiliki visi keadilan yaitu mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.⁴⁹

Demokrasi politik menurut Soekarno yaitu persamaan hak sebagai warga negara dalam segala aspek kehidupannya, di mana rakyat jelata dapat memilih dan dipilih. Sedangkan demokrasi ekonomi yaitu bahwa setiap individu tidak memiliki hak untuk mengakui segala sesuatunya milik pribadinya, karena sesuatu itu milik bersama dan dikelola bersama. Inilah yang membedakan antara Barat dan Indonesia, di mana konsep demokrasi politik Barat bertujuan untuk melindungi kekayaan pribadi, sedangkan demokrasi Indonesia melindungi kepentingan masyarakat (bersama).⁵⁰

Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, demokrasi yang dijalankan pada awal-awal kemerdekaan menggunakan demokrasi parlementer yang liberal karena ini adalah demokrasi barat. Yang ternyata penerapan demokrasi ini tidak sesuai dengan kultur Indonesia, dan mengakibatkan banyak permasalahan di bangsa ini. Maka dari itu Soekarno berniat untuk mewujudkan cita-cita lamanya, yaitu menerapkan demokrasi yang sesuai dengan kultur ke-Indonesiaan. Untuk mewujudkan itu menurut Soekarno rakyat harus dibimbing terlebih dahulu tentang tata cara kehidupan berdemokrasi, maka Soekarno mengupayakannya dengan sebuah istilah *guided democracy*⁵¹ (demokrasi yang terbimbing atau dipimpin), yang dalam istilah politik Indonesia dikenal dengan demokrasi terpimpin.

6. Perjalanan Demokrasi Ala Soekarno

⁴⁹*Ibid.*, 579-580.

⁵⁰*Ibid.*, 583-591.

⁵¹Soekarno, “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”, dalam Imam Toto K. Rahardjo dan WK. Herdianto (Ed.), *Bung Karno dan Partai Politik; Kenangan 100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Grasindo, 2001), 101-103.

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa Soekarno di awal jabatannya sebagai presiden RI belum mampu untuk menerapkan konsep demokrasi yang dia cita-citakan. Hal ini disebabkan oleh para orang yang ada di sekitar Soekarno yang ada di parlemen untuk menerapkan sebuah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Padahal Soekarno sendiri menginginkan suatu demokrasi yang berbeda dengan barat, yaitu demokrasi yang sesuai jati diri Bangsa Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun ternyata mayoritas suara tidak berpihak pada Soekarno, akhirnya demi sebuah persatuan agar tidak goyah Soekarno mengalah dan mengikuti kemauan pihak tersebut.

Namun ternyata, dari yang telah dilakukan itu (demokrasi parlementer) justru banyak menimbulkan ekses negatif bagi bangsa ini, seperti banyak terjadinya pemberontakan yang mengarah pada separatisme, situasi politik yang semakin kacau, konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional dan pertentangan di parlemen sendiri yang sulit sekali untuk menemukan titik temu. Melihat keadaan yang demikian, Soekarno merasa mempunyai tanggung jawab besar sebagai Presiden untuk meredam semua hal tersebut agar tidak mengancam kedaulatan NKRI yang sudah susah payah didapatkan dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Maka, Soekarno mengambil inisiatif dengan mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. Yang mana dengan dekrit ini menandakan berakhirnya sistem pemerintahan parlementer yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Soekarno mempunyai kesempatan untuk kembali mewujudkan cita-citanya yaitu menerapkan kehidupan demokrasi di Indonesia yang sesungguhnya yang sesuai jati diri bangsa dengan sistem pemerintahan presidensial. Maka sejak saat itulah konsep demokrasi Soekarno berjalan di Indonesia sampai masa akhir jabatannya sebagai Presiden. Dan terbukti dengan apa yang telah dilakukan Soekarno tersebut mampu menjadikan keadaan Bangsa Indonesia kembali normal dan kondusif.

7. Desoekarnoisasi

Berbicara mengenai desoekarnoisasi, tentunya kita tidak bisa lepas dari pemerintah (rezim) yang berkuasa sesudahnya yaitu Orde Baru.⁵² Pada masa itu tampak bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah [Orde Baru](#) di bawah Jenderal [Soeharto](#), dilakukan untuk memperkecil peranan dan kehadiran [Soekarno](#) dalam sejarah dan dari ingatan Bangsa [Indonesia](#). Segala sesuatu yang berbau Soekarno selalu dicurigai, ditekan, bahkan kalau perlu disingkirkan.

Selama Soeharto berkuasa, selama itu pula upaya desoekarnoisasi ia lakukan. Usaha untuk menghilangkan sosok Soekarno dari ingatan Bangsa Indonesia terus dilakukan, misalnya juga

masa sebelumnya. Soekarno sendiri tidak mau bila disebut sebagai Orde Lama. Soekarno lebih senang bila pada masa itu disebut sebagai Orde Revolusi.

dengan jalan mengganti nama Soekarno yang diberikan pada berbagai tempat atau bangunan di Indonesia, misalnya Stadion Gelora Bung Karno diubah namanya menjadi Stadion Utama Senayan, Kota Soekarnopura di Irian Jaya diubah menjadi Kota Jayapura, Puncak Soekarno diubah menjadi Puncak Jaya. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru itu untuk menghilangkan sosok Soekarno dari ingatan sejarah bangsa.

Dalam segi teoritis, upaya desoekarnoisasi ini juga telah mewarnai kehidupan tokoh bangsa ini. Di saat “Dwitunggal” (Soekarno-Hatta) memimpin bangsa ini, terjadi perselisihan serius antara keduanya. Hal ini mungkin belum banyak kita ketahui. Yang kita dan masyarakat Indonesia ketahui selama ini bahwa hubungan Dwitunggal antara Soekarno dan Mohammad Hatta sangat hangat dan harmonis. Sebenarnya ada masa di mana hubungan Soekarno dan Mohammad Hatta sedikit renggang dan memanas. Di mana saat itu Hatta selalu berseberangan dan tidak sepaham dengan Soekarno, bahkan Hatta selalu mengkritik dan mematahkan segala konsep dan Rezim ini memakai nama Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, untuk memosisikan dan menganggap bahwa dia adalah penerus dari pemerintahan sebelumnya yaitu Orde Lama. Istilah Orde Lama ini merupakan istilah yang diberikan secara sepihak oleh pemerintah Orde Baru terhadap kebijakan-kebijakan Soekarno, yang kemudian Hatta mengeluarkan konsep dan pemikirannya sendiri untuk menandingi Soekarno.

8. Masa Depan Demokrasi Model Soekarno

Semangat dan totalitas Soekarno dalam posisinya sebagai Presiden Indonesia kala itu yang patut di teladani oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan. Soekarno dengan semangat yang tidak pernah kendur terus berjuang secara total demi bangsa dan negaranya dan yang utama demi rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial selalu dia perjuangkan dan sistem ini sampai sekarang masih terus berjalan di Indonesia. Untuk itu, sebagaimana sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 maka sistem presidensial ini harus tetap dan terus berjalan di negara kita, karena itulah yang diamanatkan UUD 1945 sebagai landasan kita di dalam berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia saat ini, dengan sudah terbukanya kehidupan berdemokrasi, sudah semestinya Indonesia menjadi semakin kokoh dan semakin dewasa bukan malah menjadi sebaliknya. Kehidupan politik dan pemerintahan sekarang sedang populer dan sedang hangat dengan istilah koalisi-oposisi. Melalui dinamika politik yang berkembang, saat ini partai koalisi (pendukung pemerintah) bisa dikatakan mayoritas di parlemen (DPR). Dalam hal ini jangan sampai pemerintah terdikte oleh parlemen, karena kita sudah tidak lagi menggunakan sistem parlementer. Pemerintah (Presiden) harus tegas karena kita menggunakan sistem presidensial. Pemerintah harus berjuang demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan para wakil rakyat

di parlemen, apalagi kepentingan para pengusaha partai. Pemerintah harus berada di depan dan tegas dalam mengambil keputusan, apapun itu risikonya, jika itu demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana dulu sudah Soekarno lakukan.

9. Pandangan Soekarno Terhadap Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu perhatian serius Soekarno. Menurut Soekarno pendidikan harus dijalankan secara terbuka, merdeka dan demokratis. Dalam negara yang sudah merdeka maka pendidikan di Indonesia juga harus merdeka, dalam artian pendidikan di Indonesia harus berkualitas. Soekarno juga menambahkan agar pendidikan yang dijalankan di Indonesia ini harus berwawasan ke depan, mengikuti perkembangan zaman dengan terus melakukan pembaharuan-pembaharuan.

Soekarno juga menaruh perhatian terhadap pendidikan Islam. Menurut Soekarno pendidikan Islam dapat dipakai sebagai sarana transformasi masyarakat Muslim Indonesia. Bagi Soekarno, pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal dan mengembangkan intelektualitas.⁵³

Pendidikan Islam menurut Soekarno menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan, sebagaimana Soekarno katakan "*renaissance-paedagogie*", yaitu pendidikan dalam Islam harus dihidupkan kembali.⁵⁴ Karena nantinya apabila pendidikan Islam sudah kembali hidup dan maju, dengan sendirinya akan memberikan kebangkitan dan kemajuan bagi umat Islam. Islam, yang diyakini sebagai agama paling sempurna menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting yang mewajibkan umatnya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun ulang sistem pendidikan Islamnya yang lebih baru dan modern, tentunya dengan tetap berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Islam.

10. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan

Dalam kaitannya dengan demokratisasi pendidikan, Soekarno memandang perlu dan memang sudah seharusnya proses pendidikan itu dilaksanakan secara demokratis. Karena itu sangat penting agar anak didik dapat belajar tanpa dihindangi perasaan takut dan tertekan. Mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh keceriaan.⁵⁵

Atas dasar dari pemikiran Soekarno ini, maka pendidikan yang berjalan di Indonesia pelaksanaannya harus demokratis yang membuat para peserta didik merasa nyaman, semangat dan percaya diri dalam belajar. Maksudnya adalah, bentuk pengajarannya harus menumbuhkan

⁵³Baca tulisan Soekarno yang berbicara tentang ke-Islaman, yang terkumpul dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I-II (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005).

⁵⁴Soekarno, *Di Bawah*, 344.

⁵⁵*Ibid.*, 615-624.

sikap peserta didik (murid) yang kritis, demokratis, terbuka, mandiri dan bebas dalam mengemukakan pendapat dan melakukan tindakan.

11. Bentuk-bentuk Demokrasi Pendidikan

a. Kedudukan Pendidik dan Peserta Didik Dalam Proses Pendidikan

Pendidik dan peserta didik adalah dua unsur pokok dalam proses pendidikan. Pola hubungan antara pendidik dan peserta didik sangatlah menentukan efektivitas proses belajar. Menurut Soekarno pola hubungan ini harus dimulai dari guru (pendidik). Guru harus memberi teladan kepada murid-muridnya (peserta didik). Guru harus memberi contoh yang baik dalam setiap sikap dan tindakan. Sebab, di tangan para gurulah jiwa dan hati mereka ditentukan. Jika gurunya memberi contoh yang baik, para murid akan menirunya dengan sikap dan perilaku yang baik pula. Begitu juga sebaliknya.

Soekarno juga mengungkapkan bahwa hasil dari pendidikan sangatlah ditentukan dengan bagaimana cara atau sistem yang dipakai dalam proses belajar-mengajar. Pendidikan yang dihasilkan dari kultur kekerasan, maka akan membuahkan hasil anak didik yang sarat pula dengan sikap-sikap dan perilaku kekerasan. Sistem pembelajaran yang otoriter juga akan menghasilkan produk anak didik yang otoriter pula. Oleh sebab itu, Soekarno menyerukan perlunya pendidikan yang demokratis yang berbasis kerakyatan.⁵⁶

b. Kedudukan Kaum Perempuan Dalam Proses Pendidikan

Soekarno menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, bagaimana kaum perempuan tetap mendapatkan peluang untuk maju sebagaimana peluang yang dimiliki kaum laki-laki; dapat belajar secara layak, mempunyai hak berpolitik, akses dalam bidang ekonomi dan urusan-urusan publik lainnya. Dengan satu catatan, kaum perempuan tetap tidak keluar dari kodratnya sebagai perempuan.⁵⁷

Bagi Soekarno, menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki adalah penting, sebab hal ini merupakan cara yang paling prinsipil untuk memberikan peluang yang sama bagi perempuan guna mengejar ketertinggalannya. Jika kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, sudah sepatutnya pula mereka diberi peluang untuk memperoleh akses sebagaimana yang

⁵⁶Soekarno, *Di Bawah*, 616-617.

⁵⁷Lihat Soekarno, *Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Panitia Penerbit Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963)

diperoleh laki-laki. Dalam kaitannya dengan pendidikan, perempuan harus memperoleh akses pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, tanpa harus membeda-bedakannya.

11. Implikasi Demokrasi Pendidikan Menurut Soekarno Terhadap Pendidikan Islam

a. Kedudukan Pendidik dan Peserta Didik Dalam Proses Pendidikan Islam

Sesuai yang diungkapkan Soekarno bahwa pendidikan itu harus dilaksanakan secara demokratis karena itu sangat penting agar anak didik dapat belajar tanpa dihindangi perasaan takut dan tertekan. Mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh keceriaan.

Bagi pendidikan Islam yang ada di Indonesia, pelaksanaannya juga harus dilakukan secara demokratis, sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno, yang membuat para peserta didik merasa nyaman, semangat dan percaya diri dalam belajar. Untuk pendidikan Islam saat ini, dalam proses pendidikannya (pembelajarannya) sangat menuntut adanya pola interaksi yang demokratis antara pendidik dan peserta didik karena dengan begitu peserta didik tidak mempunyai perasaan tertekan dan tidak takut untuk bertanya, berdiskusi, memberi saran, mengkritisi bahkan berdebat dengan gurunya demi mendapatkan kebenaran yang hakiki, karena guru bukanlah satu-satunya sumber kebenaran, guru hanyalah berposisi sebagai pembimbing dan motivator bagi perkembangan murid. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, posisi guru dan murid adalah sejajar, yang merupakan mitra untuk sama-sama belajar.

b. Kedudukan Kaum Perempuan Dalam Proses Pendidikan Islam

Saat ini yang tidak kalah penting dan harus mendapat perhatian adalah tentang posisi kaum perempuan dalam Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan Islam. Kaum perempuan juga harus mendapat perhatian dalam pendidikan Islam. Sebagaimana Soekarno yang selalu memperjuangkan persamaan kaum perempuan, Islam juga sangat menghargai persamaan (hak dan kewajiban) antara kaum laki-laki dan perempuan, termasuk juga dalam menuntut ilmu (memperoleh pendidikan).

Di zaman modern ini, pendidikan menjadi faktor yang sangat penting bagi para kaum perempuan Muslim (Muslimah), khususnya di Indonesia. Hal ini penting agar kaum perempuan dapat berdaya dan dapat ikut membangun Islam bersama kaum laki-laki. Untuk mewujudkan itu sudah selayaknya kaum perempuan harus berpendidikan, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, agar dia bisa berbuat dan memberikan sesuatu yang berguna, baik bagi dirinya, bagi masyarakat dan bagi Islam itu sendiri.

Dalam pendidikan Islam yang berjalan di Indonesia, para perempuan Muslim yang ada di Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu sebagaimana diperoleh kaum laki-laki. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memfasilitasi hal itu, tanpa harus membeda-bedakan dan berat sebelah.

D. Penutup

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan adalah, bahwa proses pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis tujuannya agar peserta didik dapat belajar tanpa dihindangi perasaan takut dan tertekan, mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh keceriaan. Yang ditekankan Soekarno terletak pada bentuk proses belajar-mengajarnya. Menurutnya proses belajar-mengajar yang dilakukan harus menumbuhkan sikap peserta didik yang kritis, demokratis, terbuka dan bebas dalam mengemukakan pendapat dan melakukan tindakan. Soekarno menegaskan bahwa kebebasan (kemerdekaan) berpikir harus dikembangkan dan menjadi jiwa dari pendidikan di Indonesia.

Soekarno juga menaruh perhatian terhadap kaum perempuan dalam hubungannya dengan pendidikan. Soekarno menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pendidikan adalah bagaimana kaum perempuan tetap mendapatkan peluang untuk maju sebagaimana peluang yang dimiliki kaum laki-laki yaitu dapat belajar secara layak. Menurutnya kaum perempuan harus memperoleh akses pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, tanpa harus membeda-bedakannya.

Implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam adalah, bahwa dalam pendidikan Islam juga harus demikian, pelaksanaan proses belajar-mengajar harus dilaksanakan secara demokratis yang membuat para peserta didik merasa nyaman, semangat dan percaya diri dalam belajar. Pola pembelajaran dalam pendidikan Islam yang masih tradisional (*konvensional*) harus di rubah dengan pola-pola pendidikan yang lebih dinamis dan *modern* sesuai dengan tuntutan zaman. Pola hubungan guru (*ustad*) dan murid (*santri*) jangan lagi memakai pola hubungan *dogmatis* atau pola hubungan *finalistis* yang menempatkan murid sebagai obyek atau benda pasif. Guru dan murid pada hakikatnya merupakan mitra belajar (subyek dengan subyek), pola-pola hubungan lama harus ditinggalkan diganti dengan pola-pola hubungan baru, yaitu pola hubungan kemitraan yang *egaliter* antara guru dan murid. kebebasan (kemerdekaan) berpikir juga harus dikembangkan dalam pendidikan Islam.

Dalam kaitannya dengan pendidikan kaum perempuan Islam di Indonesia. Berangkat dari pendapat Soekarno, maka kaum perempuan Islam Indonesia juga harus memperoleh akses

pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, tanpa harus membeda-bedakannya. Karena Islam sendiri mengisyaratkan demikian bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu itu harus dilakukan oleh semua umat muslim, yang artinya menyeluruh baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia harus memfasilitasi hal tersebut, tanpa harus membeda-bedakan dan berat sebelah.

Penulis berharap, tulisan ini bisa menjadi wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi pendidikan Islam, khususnya yang terkait dengan wacana demokratisasi pendidikan Islam. Mudah-mudahan percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya wacana demokratisasi pendidikan Islam yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam dan Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Pendidikan Islam yang selama ini masih dominan menggunakan pendekatan yang masih tradisional (*konvensional*), hendaknya tawaran Soekarno tentang demokrasi pendidikan ini bisa dijadikan sebagai pendekatan baru dalam metodologi pendidikan Islam ke depan agar lebih *dialogis-partisipatoris* dan lebih *modern*, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykur. 1999. *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdurrahman, Dudung. 1998. *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA.
- Adams, Cindy. 2001. Adams, *Bung Karno; Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Terj. Abdul Bar Salim. Jakarta: PT. Tema Baru.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 1996. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*. Terj. Syamsudin Asyraf, dkk. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Atho', Nafisul dan Arif Fahrudin (Ed.). 2003. *Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dahm, Benhard. 2000. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: Grasindo.
- Departemen Agama RI. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Terj. Utomo Danandjaya, dkk. Cet. VI. Jakarta: LP3ES.
- Ishak, Joesoef. 2001. *100 Tahun Bung Karno; Sebuah Liber Amicorum*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Jamas, Nurhayati Jamas. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesian Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Syamsul. 2009. *Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lubis, M. Ridwan. 1992. *Pemikiran Soekarno Tentang Islam*. Jakarta: Haji Masagung.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Cet. II. Jakarta: LP3ES.
- Mangunwijaya. 1993. *Mandidik Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Dian Interfidie & Pustaka Pelajar.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Ce. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahim, Husni Rahim. 2000. *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Rahardjo, Imam Toto K. dan WK. Herdianto (Ed.). *Bung Karno dan Partai Politik; Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo.
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid I-II. Cet. V. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Soekarno. 1963. *Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perdjongan Republik Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Panitia Penerbit Buku Karangan Presiden Soekarno.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhelmi, Ahmad. 2002. *Polemik Negara Islam; Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Teraju.
- Sutrisno. 2006. *Pendidikan Islam yang Menghidupkan; Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.